

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Masalah yang diangkat adalah Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 212/Pid.Sus/2023/Pn.Jmb dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun media sosial di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Apakah putusan yang dijatuhkan dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik pada akun media sosial di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi sudah mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Normatif*. Salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*). Berdasarkan sebuah pertimbangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kedua, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pelaku tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan penjara. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa Reky Erlanda Bin Thabrani melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap korban melalui media sosial secara berlanjut yang telah merugikan dan meresahkan korban. selanjutnya terjadinya kesalahan/kekeliruan terhadap orang (*Error In Person*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 8 (delapan) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Saran yang dikemukakan hendaknya Dalam mempertimbang dan menjatuhkan putusannya hendaknya seorang hakim memiliki keputusan yang adil jangan sampai terjadi kesalahan/kekeliruan terhadap orang (*Error In Person*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Analisis Putusan Hakim, Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, Akun Media Sosial

ABSTRACT

The Indonesian state is a legal state as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 1 paragraph 3, third amendment. In the explanation of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regarding the State government system, it is stated that "the Indonesian State is based on law (Rechtsstaat), not based on mere power (Machtsstaat)". The issue raised was what was the basis for the judge's consideration in handing down decision Number: 212/Pid.Sus/2023/Pn.Jmb in the criminal act of insult and defamation on social media accounts in the legal area of the Jambi District Court. Does the decision handed down in the criminal act of insulting and defamation on social media accounts in the legal area of the Jambi District Court reflect justice and have a deterrent effect. The specification of this research is analytical descriptive research. In writing this thesis the author used the Normative Juridical research type. One of the author's data information as a research object is using secondary documents (Jambi District Court Decision). Based on a consideration that it has been legally proven and convincing that the defendant has committed the criminal act as charged by the public prosecutor in the second indictment, and because there are no excuses that negate the illegal nature and justification that eliminates the defendant's guilt, then the defendant must be declared guilty and the defendant must be sentenced to a crime commensurate with his actions which are threatened according to Article 45 paragraph (3) in conjunction with Article 27 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, with a maximum imprisonment of 4 (four) years. However, in this case the defendant was sentenced to 8 (eight) months in prison. The sentence handed down was still too light considering that the defendant Reky Erlanda Bin Thabrani had continuously defamed and insulted the victim via social media which had harmed and disturbed the victim. Furthermore, errors/mistakes occur in the person (Error in Person) who is presented as the Defendant in the verdict so that the principle of free and impartial justice which guarantees the equality of every citizen under the law does not work well. So the judge's verdict of only 8 (eight) months in prison was deemed not to reflect justice and have a deterrent effect on the defendant. The suggestions put forward should be that in considering and handing down a decision, a judge should make a fair decision so that there is no error/mistake in the person (Error in Person) who is presented as the Defendant in the verdict so that the principle of free and impartial justice which guarantees the equality of every citizen under the law works well.

Keywords: *Analysis of Judge's Decisions, Crime of Insult and Defamation, Social Media Accounts*